



RENCANA KERJA PERUBAHAN TH. 2023

DINAS PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan HidayahNya, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renja Perubahan ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen satu tahunan bagi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk menyusun program yang selaras dengan dokumen yang lebih tinggi dan merumuskan program dan kegiatan yang progresif untuk menjawab permasalahan yang ada.

Penyusunan Renja Perubahan disusun secara partisipatif dan melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal. Penyusunan Renja Perubahan ini merupakan langkah awal penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan ketentuan. Kami mengakui masih banyak kekurangan dan perlunya penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini. Oleh karena itu kerja keras dari semua pihak terutama dari unsur pimpinan dan staf yang ada di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah patut disyukuri.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan oleh peran multi pihak dan sektoral sehingga Renja Perubahan ini dapat selesai disusun. Renja Perubahan ini akan kami jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Renja Perubahan ini wajib dipedomani oleh seluruh pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sehingga semua komponen harus berkomitmen mewujudkan tercapainya indikator kinerja program kegiatan serta tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Renja Perubahan Dinas tahun 2023.

Kedepan, hal yang harus segera kami lakukan adalah peningkatan kapasitas pegawai sehingga target capaian Renja Perubahan Tahun 2023 yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat tercapai.

Semoga apa yang kita rintis berupa perencanaan yang partisipatif dan sesuai ketentuan yang ada menjadi langkah awal kami menjalankan program dan kegiatan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023.

Semarang, 25 September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	19
3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023	21
BAB IV PENUTUP.....	80

DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Perubahan	2
-----	---	---

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah	11
3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023	20
3.2	Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan) Provinsi Jawa Tengah	24

BAB I

PENDAHULUAN

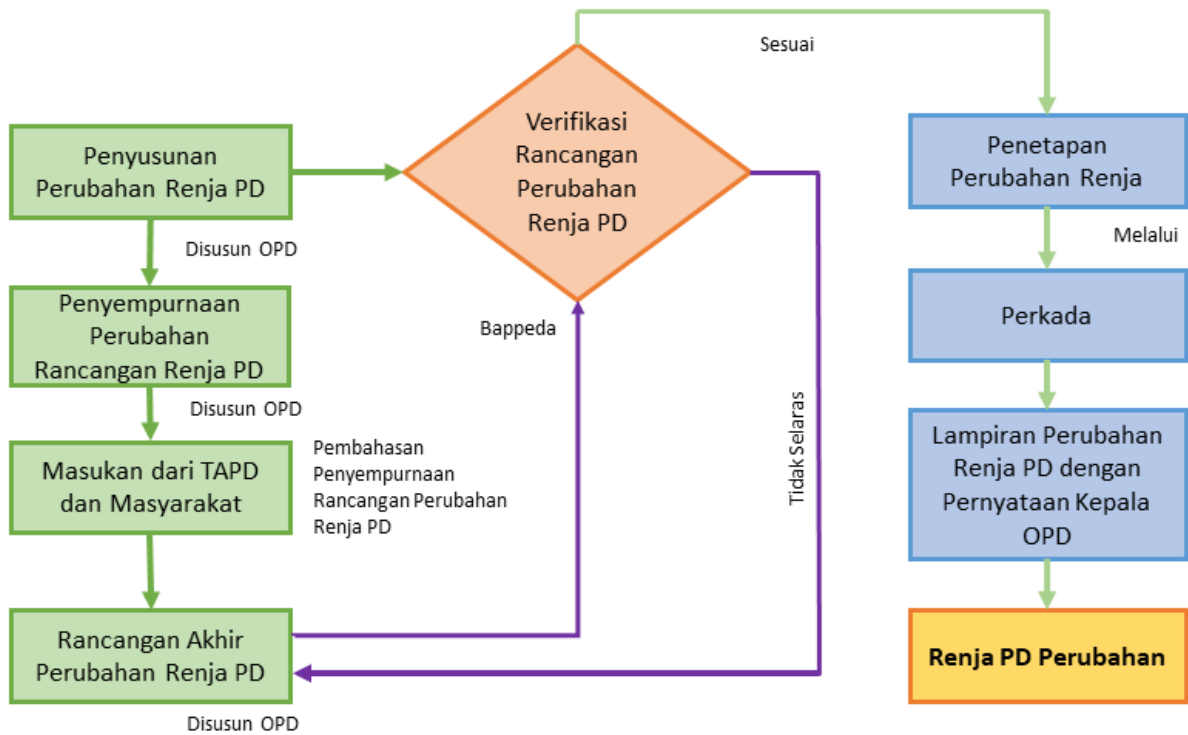
1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2023 sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai upaya memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat/stakeholder terkait dari hasil evaluasi semester pertama tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan disusun sebagai tindak lanjut Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Perangkat Daerah perubahan disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Provinsi Jawa Tengah pada tahun berjalan.

Proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Evaluasi hasil capaian kinerja triwulan II dan Penetapan target indikator dan anggaran perubahan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut :

Bagan 1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Perubahan



Rancangan perubahan dalam RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam perubahan Renja RKPD dan harus sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan perubahan RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta hasil evaluasi triwulan II berdasarkan program prioritas RKPD yang disusun ke dalam rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mengacu pada kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 yang dituangkan di dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dituangkan di dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang sudah disusun.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 13. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Pemutahiran Permendagri 90/2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (6/85/2017) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-12/2018) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (16-286/2019) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-2/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);

29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-54/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (4-56/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (5-93/2022) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Indikator Kabupaten/kota Layak Anak;

38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
39. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);
42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023;
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah memberikan arah optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh unsur internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun.
3. Sebagai alat untuk menyelaraskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2023

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023 serta kaitannya dengan capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, analisis laporan kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta reviu terhadap capaian kinerja RKPD.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi uraian ringkas tentang rumusan program dan kegiatan perangkat daerah, indikator kinerja dan kelompok sasaran pencapaian

Renja Perangkat Daerah dan pendanaan indikatif beserta sumbernya tahun 2023 serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif tahun 2024.

BAB IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Keberhasilan kinerja dapat dilihat dari realisasi capaian program dan kegiatan yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, capaian pelaksanaan program dan kegiatan harus di evaluasi secara berkala dan menyeluruh.

Capaian Kinerja Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun dalam pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Renstra 2018-2023 s/d Tahun 2023			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2												
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2	08											
	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2	08	02										
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6,84 per 100.000	7,90 per 100.000		6,84 per 100.000	13,82 per 100.000	202,05%	13,82 per 100.000			
2	08	02	101	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	60%	42,85%		60%	60%	60%	
2	08	02	102	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial	40%	30%		40%	23,74%	59,35%	40%
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5,64 per 100.000	4,38 per 100.000		5,64 per 100.000	1,48 per 100.000	381,08%	5,64 per 100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2018-2023 s/d Tahun 2023			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
		Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	20%	20%		20%	20%	100%	20%			
		Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	20%	15%		20%	15%	75%	20%			
2	08	03	101	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	13,89%	75%		13,89%	80%	576%	80%
2	08	03	102	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	100%		100%	100%	100%	100%
2	08	03	103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	40 kelompok	32 kelompok		8 kelompok	8 kelompok	100%	8 kelompok
				Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg		20 kelompok	20 kelompok		20 kelompok	15 kelompok	75%	20 kelompok

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2018-2023 s/d Tahun 2023	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				aktif kewenangan Provinsi								
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	40%	63,88%		40%	63,88%	159,7%	63,88%
					Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak	40%	63,88%		40%	63,88%	159,7%	63,88%
2	08	04	101	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender	50%	100%		50%	35%	70%	50%
2	08	04	102	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	48,57%	42,85%		48,57%	42,85%	88,22%	48,57%
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	20%	20%		20%	20%	100%	20%
2	08	05	101	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	12 kab/kota	5 kab/kota		7 kab/kota	7 kab/kota	100%	7 kab/kota
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama	100%	100%		100%	100%	100%	100%
					Persentase Keterisian	25%	20%		25%	5%	20%	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2018-2023 s/d Tahun 2023	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)								
2	08	06	101	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	35 kab/kota	35 kab/kota		35 kab/kota	35 kab/kota	100%	35 kab/kota
2	08	06	102	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	15 kelompok	10 kelompok		15 kelompok	0 kelompok	0%	15 kelompok
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,36 per 100.000	10,33 per 100.000		12,36 per 100.000	3,34 per 100.000	370,06%	12,36 per 100.000
					Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring	20%	20%		20%	10%	50%	20%
2	08	07	101	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	13,89%	50%		13,89%	8%	57,50%	13,89%
2	08	07	102	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	100%		100%	100%	100%	100%
					Jumlah lembaga yg dikuatkan dan dikembangkan bagi anak yg membutuhkan perlindungan khusus	10 kelompok	10 kelompok		10 kelompok	5 kelompok	50%	10 kelompok
2	08	07	103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan	15 kelompok	15 kelompok		15 kelompok	15 kelompok	100%	15 kelompok

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2018-2023 s/d Tahun 2023			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
		dan pengembangannya										
		Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	15 kelompok	10 kelompok		15 kelompok	15 kelompok	100%	15 kelompok			
2	14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	27,70%	44,44%		27,70%	61,11%	220.61%	61,11%	
				Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	35%	25%		35%	35%	100%	35%	
2	14	02	101	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK	20 kab/kota	16 kab/kota		20 kab/kota	22 kab/kota	110%	22 kab/kota
2	14	02	102	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	10 dokumen	15 dokumen		10 dokumen	16 dokumen	160%	16 dokumen
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	30%	29,58%		30%	26,27%	87,56%	30%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2018-2023 s/d Tahun 2023			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
		Unmeetneed KB	12,76%	11,63%		12,76%	10,53%	121,17%	12,76%			
2	14	03	101	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta KB Aktif	9.534.000 orang	4.346.881 orang		4.901.017 orang	76,17%	4.901.017 orang	
2	14	03	102	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB	17,50%	27,65%		17,50%	32,38%	185%	32,38%
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan	96,30%	97,79%		96,30%	86,15%	89,46%	96,30%
					Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan	91%	91,53%		91%	86,31%	94,85%	91%
					Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota	30%	25%		30%	30%	100%	30%
2	14	04	101	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok tribina yang aktif	26.779 kelompok	21.854 kelompok		21.540 kelompok	18.173 kelompok	84,37%	21.540 kelompok
2	14	04	102	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif	15.456 kelompok	7.333 kelompok		7000 kelompok	5531 kelompok	79%	7000 kelompok
					Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan	35%	30%		35%	35%	100%	35%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2018-2023 s/d Tahun 2023		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		pembangunan keluarga									
X		Non Urusan									
X	XX	Eks BAU									
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	90%	90%	90%	40%	44,44%	90%	
				Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	
X	XX	01	101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	5 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	2 dokumen
X	XX	01	102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	5 laporan	4 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan
X	XX	01	103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 laporan	8 laporan	2 laporan	1 laporan	50%	2 laporan
X	XX	01	105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 laporan	4 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan
X	XX	01	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	5 laporan	4 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan
X	XX	01	107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 laporan	8 laporan	2 laporan	1 laporan	50%	2 laporan
X	XX	01	108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 laporan	4 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan
X	XX	01	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan	10 laporan	8 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2018-2023 s/d Tahun 2023
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mendasarkan pada isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain : 1) kesenjangan gender; 2) pemenuhan hak anak; 3) perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan; 4) kesertaan keluarga berencana; 5) ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, tujuan Renja perubahan dirumuskan untuk :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak;
2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Guna mendukung pencapaian tujuan Perubahan Renja tersebut, sasaran difokuskan pada :

1. Meningkatnya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak (PHA) di berbagai sektor pembangunan;
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya kesertaan keluarga berencana;
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Meningkatnya komitmen dan peran serta jejaring kelembagaan masyarakat;

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi OPD, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran dituangkan dalam table berikut.

Tabel 3.1.

**Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2023	
					Renja PD	P-Renja PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak		Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	%	34,3	38,88
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,7	72,9
			Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	%	100	100
			Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,07	8,07
		Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	62,85	82,85
			Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%	90	90
		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8.02	8.02

2.	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas		Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.19	2.19
		Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	65,17	65,17
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	56,29	56,29

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 terdiri dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah beserta pendanaan yang menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhatikan program prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam RKPD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 selama satu tahun mendatang yang dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan sesuai dengan RKPD Perubahan Tahun 2023 antara lain :

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Pembangunan sebesar 6,84 per 100.000.
- b. Program Perlindungan Perempuan**
Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dak); Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator penurunan rasio korban kekerasan terhadap perempuan sebesar 5,64 per 100.000; Persentase Kabupaten/Kota yang

sudah Melaksanakan Pendataan Kekerasan secara Berjejing sebesar 20%.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi; Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Penyelenggaraan Program Kualitas Keluarga Berbasis Gender sebesar 40%; Persentase Penyelenggaraan Program Kualitas Keluarga Berbasis Pemenuhan Hak Anak sebesar 40%.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Kegiatan diarahkan pada Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Keterisian Indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi sebesar 20%.

e. Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama sebesar 100%; Persentase Keterisian Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebesar 25%.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi (dak); Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak sebesar 12,36 per 100.000; Persentase Kabupaten/Kota yang sudah Melaksanakan Pendataan Kekerasan secara Berjejing sebesar 20%.

g. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan diarahkan pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Pemerintah daerah yang menyusun

GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang sebesar 27,7%; Persentase Kabupaten/Kota dalam Pendataan Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) sebesar 35%.

h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 30%; Unmetneed KB sebesar 12,76%.

i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase UPPKA yang Aktif Melaporkan Kegiatan sebesar 91%; Persentase Kelompok Tribina yang Aktif Melaporkan Kegiatan sebesar 96,3%; Persentase Keterisian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten/Kota sebesar 30%.

j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD sebesar 100%; persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah sebesar 90%.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirumuskan sebesar Rp 22.021.292.000,-; dengan rincian pagu indikatif pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 5.858.046.000,-; pagu indikatif pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 2.007.780.000,-; dan pagu indikatif pada urusan Penunjang Pemerintah daerah sebesar Rp 13.825.101.000,-.

Tabel 3.2
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan) Provinsi Jawa Tengah

Nama PD: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak									5.877.046.000		5.877.046.000		5.858.046.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,7		72,7		72,9				
						Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	%	34,3		34,3		38,88				
						Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	%	100		100		100				
						Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,07		8,07		8,07				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan								5.877.046.000		5.877.046.000		5.858.046.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	62,85	1.014.210.000	62,85	1.014.210.000	82,85	1.005.210.000			
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						175.000.000		175.000.000		175.000.000			
						Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak	%	40	175.000.000	40	175.000.000	40	175.000.000			
		2.08.04.1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					175.000.000		175.000.000		175.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	%	48,57	175000000	48,57	175000000	48,57	175.000.000			SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
		2.08.04.1.03.01			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			175.000.000		175.000.000		175.000.000	Semarang	Semarang		
						Jumlah penyedia layanan komprehensif bagi keluarga	Kelompok	7	175.000.000	7	175.000.000	7	175.000.000	OPD Provinsi; DKI JAKARTA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG, JEPARA/REMBANG ;	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					200.000.000		200.000.000		200.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	%	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	Semarang	Semarang	
		2.08.05.1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000		200.000.000		200.000.000			
						Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	Kabupaten/Kota	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	Semarang	Semarang	SEKSI DATA DAN INFORMASI
		2.08.05.1.01.01			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi				200.000.000		200.000.000		200.000.000	Provinsi	Provinsi	
						Jumlah ketersediaan dokumen data gender dan anak	Dokumen	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; 35 kab/kota	SEKSI DATA DAN INFORMASI
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						639.210.000		639.210.000		630.210.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama	%	100	539.210.000	100	539.210.000	100	537.210.000	Semarang	Semarang	
		2.08.06.1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					539.210.000		539.210.000		537.210.000			
						Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	Kabupaten/Kota	35	539.210.000	35	539.210.000	35	537.210.000	Provinsi	Provinsi	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
		2.08.06.1.01.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					439.210.000		439.210.000		437.210.000	Provinsi	Provinsi	
						Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan	Orang	35	439.210.000	35	439.210.000	35	437.210.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	Provinsi Jawa Tengah; 35 kab/kota	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						pemenuhan hak anak										
		2.08.06.1.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				100.000.000		100.000.000		100.000.000	Provinsi	Provinsi	
						Jumlah forum anak yang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan tingkat provinsi	Kelompok	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; Kota Semarang, Kab. Semarang, Kota Salatiga	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
						Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	%	25	100.000.000	25	100.000.000	25	93.000.000	Semarang	Semarang	
		2.08.06.1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					100.000.000		100.000.000		93.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	15	100.000.000	15	100.000.000	15	93.000.000	Provinsi	Provinsi	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
		2.08.06.1.02.03			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			60.000.000		60.000.000		60.000.000				
						Jumlah peserta KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi	Orang	35	60.000.000	35	60.000.000	35	60.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> Kota Salatiga	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> Kota Salatiga	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.06.1.02.04			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000		40.000.000		33.000.000			
						Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak	Kelompok	10	40.000.000	10	40.000.000	10	33.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> Kota Semarang	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> Kota Semarang	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
						Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%	90	2.657.500.000	90	2.657.500.000	90	2.651.000.000	Provinsi	Provinsi	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						2.557.500.000		2.557.500.000		2.539.000.000			
						Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	Per 100.000	6,84	2.557.500.000	6,84	2.557.500.000	6,84	2.539.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.02.1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					455.000.000		455.000.000		487.189.000			
						Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	%	60	455000000	60	455000000	60	487.189.000	Provinsi	Provinsi	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.02.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi				15.000.000		15.000.000		18.000.000	Semarang	Semarang	
						Jumlah peserta perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi	Orang	30	15.000.000	30	15.000.000	30	18.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.02.1.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi				70.000.000		70.000.000		74.500.000			
						Jumlah peserta sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi	Orang	60	70.000.000	60	70.000.000	60	74.500.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KAB.DEMAK	
		2.08.02.1.01.03			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi				265.000.000		265.000.000		277.489.000			
						Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kegiatan	2	265.000.000	2	265.000.000	2	277.489.000	OPD Provinsi; DKI JAKARTA; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA, KOTA SALATIGA	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.02.1.01.04			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi				105.000.000		105.000.000		117.200.000	Semarang	Semarang	
						Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG	Orang	100	105.000.000	100	105.000.000	100	117.200.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.02.1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi					2.102.500.000		2.102.500.000		2.051.811.000			
						Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial	%	40	2102500000	40	2102500000	40	2.051.811.000			SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.02.1.02.01			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				1.077.500.000		1.077.500.000		1.026.811.000	5 Kab	5 Kab	
						Jumlah peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Provinsi	Orang	2900	1.077.500.000	2900	1.077.500.000	2900	1.026.811.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH : 35 KAB/KOTA	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.02.1.02.02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				1.025.000.000		1.025.000.000		1.025.000.000			
					Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Provinsi		Orang	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH : KAB. REMBANG, KAB. BLORA, KAB. KLATEN, KAB. CILACAP, KAB. MAGELANG	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						100.000.000		100.000.000		112.000.000			
					Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender		%	40	100.000.000	40	100.000.000	40	112.000.000	Semarang	Semarang	
		2.08.04.1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan					100.000.000		100.000.000		112.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi												
						Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender	%	50	100000000	50	100000000	50	112.000.000	Semarang	Semarang	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.04.1.01.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		112.000.000			
						Jumlah pelaksanaan Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender kewenangan Provinsi dan lintas Kab/Kota	Kegiatan	2	100.000.000	2	100.000.000	2	112.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG		SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak								5.877.046.000		5.877.046.000		5.858.046.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,02	2.205.336.000	8,02	2.205.336.000	8,02	2.201.836.000			
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						1.502.836.000		1.502.836.000		1.499.336.000			
						Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	%	20	415.000.000	20	415.000.000	20	415.000.000	Provinsi	Provinsi	
		2.08.03.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					415.000.000		415.000.000		415.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	Kelompok	20	415.000.000	20	415.000.000	20	415.000.000			SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
		2.08.03.1.03.04			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				415.000.000		415.000.000		415.000.000	Semarang	Semarang	
					Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota		Orang	35	415.000.000	35	415.000.000	35	415.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH ; SEMARANG ; PATI ; MAGELANG ; JEPARA ; PEKALONGAN	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
					Rasio korban kekerasan terhadap perempuan		Per 100.000	5,64	1.087.836.000	5,64	1.087.836.000	5,64	1.084.336.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.03.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					197.211.000		197.211.000		197.211.000			
						Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	13,889	197211000	13,889	197211000	13,889	197.211.000			SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.08.03.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				46.875.000		46.875.000		46.875.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah	
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Provinsi	Orang	35	46.875.000	35	46.875.000	35	46.875.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.01.02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			150.336.000		150.336.000		150.336.000	0				
						Jumlah peserta Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	Orang	195	150.336.000	195	150.336.000	195	150.336.000	0	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH ; DEMAK ; REMBANG ; TEMANGGUNG ; TEGAL ; SALATIGA ; BOYOLALI ; PEKALONGAN	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.03.1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					358.750.000		358.750.000		358.750.000	Semarang	Semarang	
						Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	%	100	358750000	100	358750000	100	358.750.000			SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.08.03.1.02.01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000		250.000.000		250.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang dilayani bagi perempuan korban kekerasan	%	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.08.03.1.02.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				108.750.000		108.750.000		108.750.000	Provinsi	Provinsi	
						Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Orang	10	108.750.000	10	108.750.000	10	108.750.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.08.03.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					531.875.000		531.875.000		528.375.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	8	531875000	8	531875000	8	528.375.000			SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.08.03.1.03.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				75.000.000		75.000.000		75.000.000	Provinsi	Provinsi	
						Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi	Orang	120	75.000.000	120	75.000.000	120	75.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK ; MAGELANG ; PURWOREJO	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.08.03.1.03.02			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan				406.875.000		406.875.000		403.375.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi											
						Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi	Orang	100	406.875.000	100	406.875.000	100	403.375.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG ; PATI;MAGELANG;REMBANG;CILACAP;KLATEN;BLORA;BANJARNEGARA;BREBES;BANYUMAS;KEBUMEN	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.08.03.1.03.03			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi			50.000.000		50.000.000		50.000.000				
						Jumlah ketersediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi	Unit	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES	OPD Provinsi; JAWA TENGAH SURAKARTA ; SEMARANG	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						khusus kewenangan Provinsi									; TEGAL ; PURWOREJO	
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						702.500.000		702.500.000		702.500.000			
						Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejang	%	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000			
		2.08.07.1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					10.000.000		10.000.000		10.000.000			
						Jumlah lembaga yg dikuatkan dan dikembangkan bagi anak yg membutuhkan perlindungan khusus	Kelompok	10	10000000	10	10000000	10	10.000.000			SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.07.1.02.04			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				10.000.000		10.000.000		10.000.000			
						Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka perlindungan khusus anak	Kelompok	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
		2.08.07.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000		50.000.000		50.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	Kelompok	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000			SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
		2.08.07.1.03.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			50.000.000		50.000.000		50.000.000	Semarang	Semarang		
						Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
						Rasio korban kekerasan terhadap anak	Per 100.000	12,36	642.500.000	12,36	642.500.000	12,36	642.500.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.07.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					126.875.000		126.875.000		126.875.000			
						Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	%	13,889	126.875.000	13,889	126.875.000	13,889	126.875.000			SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.01.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				80.000.000		80.000.000		80.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi	Kegiatan	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH : Kab. Grobogan ; Kab. Temanggung ; Kab. Demak ; Kab. Magelang	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				46.875.000		46.875.000		46.875.000			
						Jumlah rakor pencegahan kekerasan terhadap anak	Kegiatan	2	46.875.000	2	46.875.000	2	46.875.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					383.750.000		383.750.000		383.750.000			
						Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat	%	100	383750000	100	383.750.000	100	383.750.000			SEKSI PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						layanan sesuai standar										
		2.08.07.1.02.01			Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				225.000.000		225.000.000		225.000.000			
						Persentase penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	%	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.02.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				108.750.000		108.750.000		108.750.000			
						Jumlah rakor pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kegiatan	2	108.750.000	2	108.750.000	2	108.750.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						kewenangan Provinsi										
		2.08.07.1.02.03			Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000	Provinsi	Provinsi	
						Jumlah KIE bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Kegiatan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					131.875.000		131.875.000		131.875.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	15	131875000	15	131875000	15	131.875.000			SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.03.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			100.000.000		100.000.000		100.000.000	Semarang	Semarang		
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Kegiatan	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.07.1.03.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				31.875.000		31.875.000		31.875.000			
						Jumlah pelatihan bagi penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Kegiatan	2	31.875.000	2	31.875.000	2	31.875.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH ; SEMARANG	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									15.373.767.000		15.446.939.000		14.155.466.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	85		85		85				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja								15.373.767.000		15.446.939.000		14.155.466.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	perangkat daerah															Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	79,1	453.500.000	79,1	453.500.000	79,1	506.720.000			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						453.500.000		453.500.000		506.720.000			
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	453.500.000	100	453.500.000	100	506.720.000			
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					453.500.000		453.500.000		506.720.000			
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	2	453.500.000	2	453.500.000	2	506.720.000			SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					253.500.000		253.500.000		237.500.000			
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1	253.500.000	1	253.500.000	1	237.500.000	OPD Provinsi; DKI JAKARTA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH;DKI JAKARTA	SUB BAGIAN PROGRAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															; DIY ; JAWA TIMUR	
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000		269.220.000			
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	269.220.000	OPD Provinsi; DKI JAKARTA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH;DKI JAKARTA ; DIY ; JAWA TIMUR	SUB BAGIAN PROGRAM
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								15.373.767.000		15.446.939.000		14.155.466.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	85	14.920.267.000	85	14.993.439.000	85	13.648.746.000			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14.920.267.000		14.993.439.000		13.648.746.000			
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	90	14.920.267.000	90	14.993.439.000	90	13.648.746.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.614.477.000		11.687.649.000		10.290.022.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	11.614.477.000	1	11.687.649.000	1	10.290.022.000			SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.184.477.000		11.257.649.000		9.919.956.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	11.184.477.000	12	11.257.649.000	12	9.919.956.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			310.000.000		310.000.000		267.200.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	310.000.000	12	310.000.000	12	267.200.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			70.000.000		70.000.000		63.855.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	3	70.000.000	3	70.000.000	3	63.855.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				25.000.000		25.000.000		21.080.000			
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	21.080.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000		25.000.000		17.931.000			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	4	25.000.000	4	25.000.000	4	17.931.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					64.470.000		64.470.000		74.470.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	64.470.000	2	64.470.000	2	74.470.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				64.470.000		64.470.000		74.470.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	64.470.000	12	64.470.000	12	74.470.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					106.200.000		106.200.000		111.200.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	106.200.000	1	106.200.000	1	111.200.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-		-		-			
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0	-	0	-	0	-	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		10.000.000		15.000.000			
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		10.000.000		10.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop / Seminar	Orang	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-				
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	-	0	-	0	-	OPD Provinsi		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			86.200.000		86.200.000		86.200.000				
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	72	86.200.000	72	86.200.000	72	86.200.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				635.780.000		635.780.000		715.714.000				
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	635.780.000	1	635.780.000	1	715.714.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.190.000		9.190.000		14.190.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	9.190.000	12	9.190.000	12	14.190.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				130.590.000		130.590.000		140.590.000			
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	5	56.590.000	5	56.590.000	5	90.840.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	74.000.000	12	74.000.000	12	49.750.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		-		-			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	0	-	0	-	0	-	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				120.000.000		120.000.000		131.450.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	12	131.450.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		20.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				185.000.000		185.000.000		190.000.000			
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	185.000.000	12	185.000.000	12	190.000.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160.000.000		160.000.000		208.484.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	160.000.000	12	160.000.000	12	208.484.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				11.000.000		11.000.000		11.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	11.000.000	12	11.000.000	12	11.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah					14.790.000		14.790.000		43.790.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2	14.790.000	2	14.790.000	2	43.790.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-			-		-			
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	0	-	0	-	0	-	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel			-			-		-			
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0	-	0	-	0	-	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-			-		-			
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0	-	0	-	0	-	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			14.790.000			14.790.000		43.790.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0	14.790.000	0	14.790.000	5	43.790.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.935.000.000		1.935.000.000		1.568.000.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.935.000.000	1	1.935.000.000	1	1.568.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				580.000.000		580.000.000		353.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	580.000.000	12	580.000.000	12	353.000.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.350.000.000		1.350.000.000		1.210.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.350.000.000	12	1.350.000.000	12	1.210.000.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					549.550.000		549.550.000		845.550.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	549.550.000	1	549.550.000	1	845.550.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	0	-	0	-	0	-	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				178.800.000		178.800.000		198.800.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	178.800.000	12	178.800.000	12	198.800.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				-		-		-			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0	-	0	-	0	-	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				275.010.000		275.010.000		515.010.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	275.010.000	1	275.010.000	1	515.010.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				67.640.000		67.640.000		83.640.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	67.640.000	12	67.640.000	12	83.640.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			28.100.000		28.100.000		48.100.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	28.100.000	12	28.100.000	12	48.100.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Mewujudkan keluarga kecil berkualitas								2.035.000.000		2.035.000.000		2.007.780.000				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	%	2,19		2,19		2,19				
	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana								2.035.000.000		2.035.000.000		2.007.780.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	%	65,17	1.585.000.000	65,17	1.585.000.000	65,17	1.565.780.000			
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						330.000.000		330.000.000		330.000.000			
						Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	35	25.000.000	35	25.000.000	35	25.000.000			
		2.14.02.1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi					25.000.000		25.000.000		25.000.000			
						Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian	Dokumen	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000			SEKSI DATA DAN INFORMASI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Kuantitas Penduduk										
		2.14.02.1.02.06			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				25.000.000		25.000.000		25.000.000			
					Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH ; KOTA SEMARANG	SEKSI DATA DAN INFORMASI
					Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang		%	27,7	305.000.000	27,7	305.000.000	27,7	305.000.000			
		2.14.02.1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka					305.000.000		305.000.000		305.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pengendalian Kuantitas Penduduk												
						Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK	Kabupaten/Kota	20	305.000.000	20	305.000.000	20	305.000.000			SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.02.1.01.01			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)				105.000.000		105.000.000		105.000.000			
						Jumlah Peserta Workshop GDPK	Orang	50	105.000.000	50	105.000.000	50	105.000.000	OPD Provinsi	OPD Jawa Tengah : KOTA SEMARANG ; KAB.PATI	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.02.1.01.02			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				100.000.000		100.000.000		100.000.000			
						Jumlah Dokumen yang Terintegrasi dengan GDPK	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	OPD Provinsi	OPD Jawa Tengah : JAWA TENGAH ;	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															Kota Salatiga, Kab. Magelang	
		2.14.02.1.01.07			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				100.000.000		100.000.000		100.000.000			
						Jumlah peserta Workshop Advokasi Pendidikan Kependudukan dan Fasilitasi Pembentukan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)	Orang	105	100.000.000	105	100.000.000	105	100.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH ; Kota Salatiga ; Kab. Batang ; Kab. Karanganyar ; Kab. Semarang ; Kota Semarang	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA						1.255.000.000		1.255.000.000		1.235.780.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			BERENCANA (KB)													
						Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	30	1.175.000.000	30	1.175.000.000	30	1.155.780.000			
		2.14.03.1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					1.175.000.000		1.175.000.000		1.155.780.000			
						Jumlah peserta KB Aktif	Orang	4901017	1175000000	4901017	1175000000	4901017	1.155.780.000			SEKSI ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI
		2.14.03.1.01.04			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja				450.000.000		450.000.000		430.780.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah peserta penggerakan advokasi dan KIE program KKBPk melalui Mitra Kerja	Orang	1100	450.000.000	1100	450.000.000	1100	430.780.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH ; Kota Semarang ; Kab. Sragen ; Kab. Pati ; Kab. Purworejo ; Kota Salatiga ; Kab.Cilacap ; Kab. Klaten ; Kab. Banyumas ; Kab. Purbalingga ; Kab. Kudus ; Kab. Kendal ; Kab. Grobogan ; Kab. Banjarnegara ; Kab. Kebumen; Kab. Pemalang; kab. Wonosobo; Kab. Demak	SEKSI ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.14.03.1.01.07			Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				725.000.000		725.000.000		725.000.000			
						Jumlah peserta Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Orang	7500	725.000.000	7500	725.000.000	7500	725.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH ; Kab. Kendal ; Kab. Klaten ; Kab. Grobogan ; Kab. Demak ; Kab. Batang ; Kab. Semarang ; Kab. Boyolali ; Kab. Jepara	SEKSI ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI
						Unmeetneed KB	%	12,76	80.000.000	12,76	80.000.000	12,76	80.000.000			
		2.14.03.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					80.000.000		80.000.000		80.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB												
						Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB	%	17,5	80.000.000	17,5	80.000.000	17,5	80.000.000			SEKSI KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.1.02.02			Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				80.000.000		80.000.000		80.000.000	Semarang	Semarang	
						Jumlah PPKBD yang berperan serta aktif dalam pembinaan kesertaan ber-KB	Orang	180	80.000.000	180	80.000.000	180	80.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH : Kab. Semarang ; Kab. Blora ; Kab. Cilacap ; Kab. Batang ; Kab. Purworejo	SEKSI KELUARGA BERENCANA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga								2.035.000.000		2.035.000.000		2.007.780.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Indeks pembangunan keluarga	Angka	56,29	450.000.000	56,29	450.000.000	56,29	442.000.000			
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						450.000.000		450.000.000		442.000.000			
						Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan	%	96,3	200.000.000	96,3	200.000.000	96,3	192.000.000			
		2.14.04.1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					200.000.000		200.000.000		192.000.000			
						Jumlah kelompok tribina yang aktif	Kelompok	21540	200000000	21540	200000000	21540	192.000.000			SEKSI KELUARGA SEJAHTERA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.14.04.1.01.05			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				200.000.000		200.000.000		192.000.000			
						Jumlah peserta Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Orang	175	200.000.000	175	200.000.000	175	192.000.000	OPD Provinsi : JAWA TENGAH	OPD Provinsi : JAWA TENGAH Kota Salatiga ; Kab. Magelang ; Kab. Grobogan ; Kab. Sragen ; Kab. Blora	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA
						Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota	%	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000			
		2.14.04.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan					75.000.000		75.000.000		75.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												
						Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga	%	35	75.000.000	35	75.000.000	35	75.000.000			SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
		2.14.04.1.02.04			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Ekonomi Keluarga											
						Jumlah mitra dan organisasi masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pembangunan ketahanan keluarga	Kelompok	25	75.000.000	35	75.000.000	35	75.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
						Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan	%	91	175.000.000	91	175.000.000	91	175.000.000	2 Kabupaten	2 Kabupaten	
		2.14.04.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga					175.000.000		175.000.000		175.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		Renja PD	P-Renja PD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												
						Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif	Kelompok	7000	175.000.000	7000	175.000.000	7000	175.000.000			SEKSI KELUARGA SEJAHTERA
		2.14.04.1.02.02			Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			175.000.000		175.000.000		175.000.000				
						Jumlah peserta Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Orang	80	175.000.000	80	175.000.000	80	175.000.000	OPD Provinsi : JAWA TENGAH	OPD Provinsi : JAWA TENGAH ; Kab. Pemalang ; Kab. Demak	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA
								23.285.813.000		23.358.985.000		22.021.292.000				

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka pendek serta alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja yang sudah dilakukan sampai dengan semester pertama tahun 2023.

Hal-hal yang diperhatikan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 antara lain : 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Perubahan Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran akhir RPJMD tahun 2023; 2) mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Perubahan Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

Harapannya, keberhasilan pembangunan jangka pendek untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2023 yaitu “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”.

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja 2023 yang perlu diatur antara lain:

1. Sekretariat dan bidang-bidang di internal agar mendukung pencapaian target-target dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum secara optimal;
2. Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan unsur *pentahelix*, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja perubahan tahun 2023 dapat tercapai;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja Perubahan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan, pelaksanaan program maupun kegiatan Perubahan Renja secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak lanjut disusunnya Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Melakukan upaya optimal terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah;
2. Advokasi secara penuh terhadap pemenuhan hak anak di Kabupaten/Kota dan peningkatan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
3. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat serta stakeholder di Kabupaten/Kota serta mendorong terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang bersinergi dengan Kampung Keluarga Berkualitas.
4. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja dan kabupaten/kota serta mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung upaya tersebut, mulai dari pendataan, layanan aduan dengan online dan lain sebagainya.
5. Melakukan upaya optimal guna meningkatkan kesertaan keluarga berencana melalui optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dukungan layanan KB, penggerakan dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta keberlanjutan Kampung KB yang mandiri;
6. Mendorong implementasi Grand Desain Pembangunan Keluarga (GDPK) 5 pilar di daerah sebagai upaya mendorong peningkatan pengendalian kuantitas penduduk dan kualitas penduduk serta pembangunan kualitas keluarga yang responsif gender dan anak;
7. Perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina serta pemberdayaan UPPKA secara efektif dan berkelanjutan untuk mendukung penurunan stunting.